SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, dan untuk menyempurnakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

c. bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum Rapat Dengar Pendapat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3, angka 19, angka 20, angka 22 dan angka 23 Pasal 1 diubah, Pasal 1 angka 21 dan angka 27 dihapus, dan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 30 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

16. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
21. Dihapus.
22. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
23. Daftar Pemilih Pindahan, yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
24. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan

DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

25. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
26. Pencocokan dan Penelitian, yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
27. Dihapus.
28. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
29. Hari adalah hari kalender.
30. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;

b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

(2) Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

(3) Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli stiker Coklit.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), KPU melakukan analisis DP4.
(2) KPU melakukan sinkronisasi data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun data Pemilih berdasarkan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan mempertimbangkan DP4, menggunakan formulir Model A-KWK setelah menerima hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
(2) Penyusunan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:
    a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
    b. memudahkan Pemilih;

c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

6. Ketentuan ayat (5) Pasal 10 diubah, di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
(2) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
(3) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(4) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah:
a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
(5) PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.

(6) Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:

a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

(6a) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK:

a. belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
b. tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;

Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

(6b) PPDP mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) pada formulir Model A.KWK, dengan memberikan keterangan:

a. tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
b. belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

(7) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.

(8) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPS.

(10) PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.

(11) PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9), PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.

(2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih, dan Pemilih

yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.

(3) PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6b), dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK

(4) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Model A1.1-KWK.

(5) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan formulir Model A.C1-KWK.

(6) PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

(7) PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

(8) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (10) Pasal 12 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).

(1a) PPK menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dengan menggunakan formulir Model A.C2-KWK.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

(4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

(6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

(7) Dihapus.

(8) Dihapus.

(9) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A1.2-KWK.

(10) Salinan formulir Model A1.2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan salinan formulir Model AC.2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) disampaikan kepada:

a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota;

c. Panwas Kecamatan; dan

d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

9. Ketentuan ayat (1), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 13 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10) huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.

(1a) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih hasil penyusunan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1a) dengan menggunakan formulir Model A.C3-KWK.

(2) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

(4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.

(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam formulir Model A1.3-KWK.

(7a) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan formulir Model A1.3-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan formulir Model A.C3-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) kepada:
a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. Panwas Kabupaten/Kota;
d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
e. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

(8) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model A1-KWK.

(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
c. arsip PPS.

(10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.

(11) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) huruf a menggunakan formulir Model A1.4-KWK.

10. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 13A

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat berdasarkan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1a).

(2) Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota menemui dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.

(3) Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di kabupaten/kota setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di kabupaten/kota setempat dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

11. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan Pasal 15 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
   a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
   b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
   c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   d. Pemilih sudah meninggal dunia;
   e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
   f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
   g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya

diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.

(3a) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) usulan perbaikan dapat diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.

(5) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir Model A3.1-KWK.

(6) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada PPK.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) menggunakan formulir Model A3.2-KWK.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

(4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan

masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

(6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

(7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota;

c. Panwas Kecamatan; dan

d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.

(2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

(4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan

masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A3.3-KWK.

(8) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:
   a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
   b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
   c. Panwas Kabupaten/Kota;
   d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
   e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.

(10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
   a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
   b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
   c. arsip PPS.

(11) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim

Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.

14. Pasal 20 dihapus.

15. Pasal 21 dihapus.

16. Pasal 22 dihapus.

17. Pasal 23 dihapus.

18. Pasal 24 dihapus.

19. Pasal 25 dihapus.

20. Pasal 26 dihapus.

21. BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

22. Bagian Kesatu BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Daftar Pemilih Tambahan

23. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilengkapi dengan DPPh.
(2) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
    b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
    c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
    d. tugas belajar;
    e. pindah domisili; dan
    f. tertimpa bencana alam.
(4) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
(2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah

memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:

a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

26. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
(2) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
(3) Setelah pemungutan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

27. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, dan Pasal 37 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit

dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.

(2) Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan.

(3) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih dapat menunjukkan Kartu Keluarga sebagai dasar Coklit.

(4) KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS setempat mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan memberikan keterangan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

28. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

(2) Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU/KIP Kabupaten/Kota melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.

29. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan, serta proses pendistribusiannya.

30. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Mengubah sebagian dan jenis formulir untuk keperluan pemutakhiran data dan daftar Pemilih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

31. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Ketentuan mengenai tata cara pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini dan Peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan, program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

32. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KETENTUAN PERALIHAN

33. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 41A dan Pasal 41B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

(1) Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan Surat Keterangan paling lambat bulan Desember 2018.
(2) Terhitung sejak bulan Januari 2019, syarat terdaftar sebagai Pemilih hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 41B

Pemutakhiran data dan daftar Pemilih yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan KPU ini diundangkan, dinyatakan sah dan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan KPU ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KPU ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1354

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

| NO | KODE | NAMA |
|---|---|---|
| MODEL A | | |
| 1. | A-KWK | Daftar Pemilih |
| 2. | A.A-KWK | Daftar Pemilih Baru |
| 3. | A.A.1-KWK | Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih |
| 4. | A.A.2-KWK | Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian |
| 5. | A.B-KWK | Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran |
| 6. | A.C-KWK | Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik |
| 7. | A.C.1-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan |
| 8. | A.C.2-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan |
| 9. | A.C.3-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten/Kota |
| 10. | A.C.4-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Provinsi |
| 11. | A.1-KWK | Daftar Pemilih Sementara |
| 12. | A.1.1-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan |
| 13. | A.1.2-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan |
| 14. | A.1.3-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota |
| 15. | A.1.4-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi |
| 16. | A.1.A-KWK | Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS |
| 17. | A.2-KWK | Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan |
| 18. | A.3-KWK | Daftar Pemilih Tetap |

| NO | KODE | NAMA |
|---|---|---|
| MODEL A | | |
| 19. | A.3.1-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan |
| 20. | A.3.2-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan |
| 21. | A.3.3-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota |
| 22. | A.3.4-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi |
| 23. | A.4-KWK | Daftar Pemilih Pindahan |
| 24. | A.5-KWK | Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) |
| 25. | A.Tb-KWK | Daftar Pemilih Tambahan |

Model A-KWK

**DAFTAR PEMILIH**

**PEMILIHAN .....**

**TAHUN .....**

**PROVINSI** : .....
**KABUPATEN/KOTA** : .....
**Kecamatan** : .....
**Desa/Kelurahan** : .....
**TPS** : .....

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan *) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

keterangan disabilitas:
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

*) Keterangan diisi:
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk
11 : belum KTP-el
12 : belum dipastikan KTP-el

Model A.A-KWK

**DAFTAR PEMILIH BARU**

**PEMILIHAN .....**

**TAHUN .....**

**PROVINSI** : .....
**KABUPATEN/KOTA** : .....
**Kecamatan** : .....
**Desa/Kelurahan** : .....
**TPS** : .....

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., ....., .....

keterangan disabilitas:
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

* Keterangan dapat diisi:
- belum KTP-el
- belum dipastikan KTP-el

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

(.....)

Model A.A.1-KWK

**CONTOH**

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN .....
TAHUN .....

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

| No | Nama Pemilih |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |

Ditanda tangani di .....
Tanggal, .....

| Kepala Keluarga /Penghuni Rumah | Petugas Pemutakhiran Data Pemilih |
|---|---|
| (.....) | (.....) |

.....

Model A.A.1-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN .....
TAHUN .....

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

| No | Nama Pemilih |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |

Ditanda tangani di .....
Tanggal, .....

| Kepala Keluarga /Penghuni Rumah | Petugas Pemutakhiran Data Pemilih |
|---|---|
| (.....) | (.....) |

Model A.A.2-KWK

# STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Model A.C-KWK

**DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik**

**PEMILIHAN .....**

**TAHUN .....**

**PROVINSI** : .....
**KABUPATEN/KOTA** : .....
**Kecamatan** : .....
**Desa/Kelurahan** : .....

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan *) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., ....., .....

keterangan disabilitas:
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

* Keterangan dapat diisi:
- belum KTP-el
- belum dipastikan KTP-el

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)

Model A.B-KWK

**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN**

**PEMILIHAN .....**

**TAHUN .....**

**PROVINSI** : .....
**KABUPATEN/KOTA** : .....
**Kecamatan** : .....
**Desa/Kelurahan** : .....
**TPS** : .....

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan *) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |

keterangan disabilitas:
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

* Keterangan di isi:
B : Pemilih baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk
11 : belum KTP-el
12 : belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., ....., .....
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)

A.C.1-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik DESA/KELURAHAN**
**PEMILIHAN ..... TAHUN .....**

**OLEH PPS**

**DESA/KELURAHAN :.....**
**KECAMATAN : .....**
**KABUPATEN/KOTA : .....**
**PROVINSI : .....**

| No. | Nomor TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| | TOTAL | | | | |

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

| | Nama | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1. Ketua | ..... | ..... |
| 2. Anggota | ..... | ..... |
| 3. Anggota | ..... | ..... |

A.C.2-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KECAMATAN**
**PEMILIHAN ..... TAHUN .....**
**OLEH PPK**

KECAMATAN : .....
KABUPATEN/KOTA : .....
PROVINSI : .....

| No. | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

| | Nama | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1. Ketua | ..... | ..... |
| 2. Anggota | ..... | ..... |
| 3. Anggota | ..... | ..... |
| 4. Anggota | ..... | ..... |
| 5. Anggota | ..... | ..... |

A.C.3-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KABUPATEN/KOTA**
**PEMILIHAN ..... TAHUN .....**
**OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

**KABUPATEN/KOTA : .....**
**PROVINSI : .....**

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal .....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

| | Nama | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1. Ketua | ..... | ..... |
| 2. Anggota | ..... | ..... |
| 3. Anggota | ..... | ..... |
| 4. Anggota | ..... | ..... |
| 5. Anggota | ..... | ..... |

A.C.4-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik PROVINSI**
**PEMILIHAN ..... TAHUN .....**

**OLEH KPU PROVINSI**

**PROVINSI :.....**

| No. | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kec. | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | |

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

| | Nama | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1. Ketua | ..... | ..... |
| 2. Anggota | ..... | ..... |
| 3. Anggota | ..... | ..... |
| 4. Anggota | ..... | ..... |
| 5. Anggota | ..... | ..... |

Model A.1-KWK

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

**PEMILIHAN .....**

**TAHUN .....**

**PROVINSI** : .....
**KABUPATEN/KOTA** : .....
**Kecamatan** : .....
**Desa/Kelurahan** : .....
**TPS** : .....

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., ....., .....

keterangan disabilitas:
1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA .....
Ketua

(.....)

A.1.1-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA/KELURAHAN**
**PEMILIHAN ..... TAHUN .....**
**OLEH PPS**

**DESA/KELURAHAN :.....**
**KECAMATAN : .....**
**KABUPATEN/KOTA : .....**
**PROVINSI : .....**

| No. | Nomor TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| | TOTAL | | | | |

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

| | Nama | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1. Ketua | ..... | ..... |
| 2. Anggota | ..... | ..... |
| 3. Anggota | ..... | ..... |

A.1.2-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KECAMATAN**

**PEMILIHAN ..... TAHUN .....**

**OLEH PPK**

KECAMATAN : .....

KABUPATEN/KOTA : .....

PROVINSI : .....

| No. | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

| | Nama | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1. Ketua | ..... | ..... |
| 2. Anggota | ..... | ..... |
| 3. Anggota | ..... | ..... |
| 4. Anggota | ..... | ..... |
| 5. Anggota | ..... | ..... |

A.1.3-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA**
**PEMILIHAN ..... TAHUN .....**
**OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

**KABUPATEN/KOTA : .....**
**PROVINSI : .....**

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal .....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

| | Nama | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1. Ketua | ..... | ..... |
| 2. Anggota | ..... | ..... |
| 3. Anggota | ..... | ..... |
| 4. Anggota | ..... | ..... |
| 5. Anggota | ..... | ..... |

A.1.4-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI**

**PEMILIHAN ..... TAHUN .....**

**OLEH KPU PROVINSI**

**PROVINSI :.....**

| No. | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kec. | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | |

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

| | Nama | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1. Ketua | ..... | ..... |
| 2. Anggota | ..... | ..... |
| 3. Anggota | ..... | ..... |
| 4. Anggota | ..... | ..... |
| 5. Anggota | ..... | ..... |

Model A.1.A-KWK

**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT**
**TERHADAP DPS**

PEMILIHAN .....
TAHUN .....

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota ..... Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :.....
Alamat :.....

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3. .....

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih : .....

NO. KK : .....

NIK/Identitas lain : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Umur : .....

Status Perkawinan (B/S/P) : .....

Jenis Kelamin : .....

Alamat

Jalan/Dukuh : .....

RT/RW : .....

Disabilitas : .....

NO. TPS : .....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah

....., ..... Tahun .....

Tertanda
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)

* menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili.

.....

Model A.1.A-KWK

**TANDA BUKTI**
**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT**
**TERHADAP DPS**

PEMILIHAN .....
TAHUN .....

Alasan memberikan tanggapan/masukan .....
untuk pemilih .....

....., ..... Tahun .....

Tertanda
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)

Model A.2-KWK

**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PERBAIKAN**

**PEMILIHAN .....**

**TAHUN .....**

**PROVINSI** : .....
**KABUPATEN/KOTA** : .....
**Kecamatan** : .....
**Desa/Kelurahan** : .....
**TPS** : .....

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan *) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |

keterangan disabilitas:
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

* Keterangan diisi:
B : Pemilih baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk
11 : belum KTP-el
12 : belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., ....., .....
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)

Model A.3-KWK

**DAFTAR PEMILIH TETAP**

**PEMILIHAN .....**

**TAHUN .....**

**PROVINSI** : .....
**KABUPATEN/KOTA** : .....
**Kecamatan** : .....
**Desa/Kelurahan** : .....
**TPS** : .....

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan *) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

keterangan disabilitas:
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

* Keterangan diisi:
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk



Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., ....., .....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA .....
Ketua

(.....)

A.3.1-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DESA/KELURAHAN**
**PEMILIHAN ..... TAHUN .....**
**OLEH PPS**

**DESA/KELURAHAN :.....**
**KECAMATAN : .....**
**KABUPATEN/KOTA : .....**
**PROVINSI : .....**

| No. | Nomor TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| | TOTAL | | | | |

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

| | Nama | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1. Ketua | ..... | ..... |
| 2. Anggota | ..... | ..... |
| 3. Anggota | ..... | ..... |

A.3.2-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN**

**PEMILIHAN ..... TAHUN .....**

**OLEH PPK**

KECAMATAN : .....
KABUPATEN/KOTA : .....
PROVINSI : .....

| No. | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

| | Nama | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1. Ketua | ..... | ..... |
| 2. Anggota | ..... | ..... |
| 3. Anggota | ..... | ..... |
| 4. Anggota | ..... | ..... |
| 5. Anggota | ..... | ..... |

A.3.3-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA**
**PEMILIHAN ..... TAHUN .....**
**OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

**KABUPATEN/KOTA : .....**
**PROVINSI : .....**

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal .....
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

| | Nama | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1. Ketua | ..... | ..... |
| 2. Anggota | ..... | ..... |
| 3. Anggota | ..... | ..... |
| 4. Anggota | ..... | ..... |
| 5. Anggota | ..... | ..... |

A.3.4-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI**

**PEMILIHAN ..... TAHUN .....**

**OLEH KPU PROVINSI**

**PROVINSI :.....**

| No. | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kec. | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | |

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

| | Nama | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1. Ketua | ..... | ..... |
| 2. Anggota | ..... | ..... |
| 3. Anggota | ..... | ..... |
| 4. Anggota | ..... | ..... |
| 5. Anggota | ..... | ..... |

Model A4-KWK

**DAFTAR PEMILIH PINDAHAN**

**PEMILIHAN .....**

**TAHUN .....**

**PROVINSI** : .....
**KABUPATEN/KOTA** : .....
**Kecamatan** : .....
**Desa/Kelurahan** : .....
**TPS** : .....

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., ....., .....

keterangan disabilitas:
1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)

Model A.5-KWK

SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN .....
TAHUN .....

NO. KK : .....
NIK/ No.Paspor : .....
Nama : .....
Jenis Kelamin : .....
Alamat : .....
.....
Alasan Pindah : .....
.....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS : ..... 4 Kabupaten/Kota : .....
2 Desa/Kelurahan : ..... 5 Provinsi : .....
3 Kecamatan : .....

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS : .....
2 Desa/Kel : .....
3 Kecamatan : .....
4 Kab/Kota : .....
5 Provinsi : .....

Panitia Pemungutan Suara
.....
Ketua,

(.....)

.....

Model A.5-KWK

SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN .....
TAHUN .....

NO. KK : .....
NIK/ No.Paspor : .....
Nama : .....
Jenis Kelamin : .....
Alamat : .....
.....
Alasan Pindah : .....
.....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS : ..... 4 Kabupaten/Kota : .....
2 Desa/Kelurahan : ..... 5 Provinsi : .....
3 Kecamatan : .....

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Dalam Negeri *)

1 TPS : .....
2 Desa/Kel : .....
3 Kecamatan : .....
4 Kab/Kota : .....
5 Provinsi : .....

Panitia Pemungutan Suara
.....
Ketua,

(.....)

Model A.Tb-KWK

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

**PEMILIHAN .....**

**TAHUN .....**

**PROVINSI** : .....
**KABUPATEN/KOTA** : .....
**Kecamatan** : .....
**Desa/Kelurahan** : .....
**TPS** : .....

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., ....., .....

keterangan disabilitas:

1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Ketua

(.....)



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah